

Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

S K R I P S I



**OLEH
M. AGUS NOVAL. S
17220033
MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG
2021**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR)*, dan SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING (NPF)* PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA

Dipersiapkan dan Disusun oleh :

M. Agus Noval. S

17220033

MANAJEMEN

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

TIM PENGUJJI

Ketua : Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM
Anggota : Sri Ermeila., SE., MSi
Penelaah : Hermanto., SP.I.M.Si



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi



Sri Ermeila, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS IBA
PALEMBANG**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. AGUS NOVAL. S
NPM : 17220033
Program Studi : MANAJEMEN
Mata Kuliah Pokok : MANAJEMEN KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA

Tanggal Persetujuan : AGUSTUS 2021.

PEMBIMBING SKRIPSI

Ketua,

Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM

Anggota

Sri Ermeila., SE., MSi

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi,



Sri Ermeila, SE., M.S.i

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. AGUS NOVAL. S

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 02 November 1995

Program Studi : Manajemen

NPM : 17.22.00.33

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interprestasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya, adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudia hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian karya ilmiah ini.

Palembang, September, 2021

buat Pernyataan,



M. AGUS NOVAL. S

NPM 17 22 00 33

Motto : “Orang Tua tidak akan pernah memintamu untuk meletakkan dunia ini di tangannya, namun tutur kata yang halus, perangai yang santun, perilaku yang bertanggung jawab dari seorang anak yaitu kebahagiaan bagi seluruh orang tua”.

“Sebelum kalian mendapatkan impian yang diinginkan, kalian harus bekerja keras dahulu untuk mencapai impian itu menjadi nyata”.

Dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Papa dan Mama tercinta,

Adik Adik ku tersayang,

Para pendidiku yang sangat kuhormati,

Seseorang yang kelak akan menjadi belahan jiwaku,

Teman-teman seperjuangan,

Dan almamater

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL ADEQUENCY RATIO (CAR), DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA

Oleh

M. Agus Noval. S

Program Studi Manajemen Universitas IBA Palembang

Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan:

Dr. Lily Rahmawati Harahap,SE.,MM
Sebagai Ketua

Sri Ermeila,SE.,M.S.i
Sebagai Anggota

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh variabel *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, dan sertifikat bank indonesia syariah terhadap *non performing financing* pada bank umum syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dilaporan keuangan tahunan setiap perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2016-2020. Teknik Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 10 bank sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel, yaitu FDR, CAR dan SBIS, sertahanya menggunakan data bank syariah yang hanya terdaftar di Otoritas jasa keuangan saja. Hasil Penelitian menunjukan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF, CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, dan SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Dari ketiga variabel tersebut, variabel yang berpengaruh dominan terhadap NPF adalah SBIS.

Kata Kunci : *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)*.

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR), CAPITAL
ADEQUENCY RATIO (CAR), AND BANK INDONESIA SHARIA CERTIFICATES
(SBIS) ON NON PERFORMING FINANCING (NPF) AT SHARIA COMMERCIAL
BANKS REGISTERED AT THE INDONESIAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

By

M. AGUS NOVAL. S

IBA Palembang University Management Study Program

Writing this thesis under the guidance of:

Dr. Lily Rahmawati Harahap,SE,MM
As Chairman

Sri Ermeila,SE,M.S.i
As a Member

This study aims to determine the effect of the variable financing to deposit ratio, capital adequacy ratio, and Islamic bank certificates on non-performing financing in Islamic commercial banks. The data used in this study is secondary data obtained in the annual financial statements of each bank. The population in this study were all Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) for the 2016-2020 period. The sampling technique used purposive sampling and obtained 10 banks. as the sample in this study. The data analysis method in this study was multiple linear regression. The limitations in this study only use three variables, namely FDR, CAR and SBIS, and only use data from Islamic banks that are only registered with the Financial Services Authority. The results showed that FDR had no significant effect on NPF, CAR had a significant negative effect on NPF, and SBIS had a significant positive effect on NPF. Of the three variables, the variable that has the dominant effect on NPF is SBIS.

Keywords: Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Bank Indonesia Syariah Certificate (SBIS)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia”,

Skripsi ini merupakan tugas dan kewajiban guna melengkapi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi. Dalam penelitian skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin, namun penulis juga menyadari masih terdapat banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dan untuk itu kiranya pembaca dapat memaklumi kekurangan tersebut.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat yang tak terhingga dari awl sampai selesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

- Bapak Dr. Tarech Rasyid,M.Si selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
- Ibu Sri Ermeila,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang dan selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk penyusunan skripsi.
- Ibu Asma Mario,SE.,MM selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang.
- Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap SE.,MM selaku Ketua Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam membimbing dan memberi arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
- Bapak Hermanto.,SP.I.,M.Si selaku Dosen Penelaah yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi

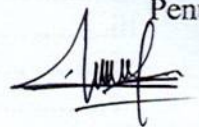
- Bapak Ilham Kurniadhi, SE.,MM selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang .
- Asma Mario.,SE.,MM sebagai Dosen Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi Univeristas IBA Palembang.
- Seluruh Dosen dan Staff tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang, yang telah banyak membantu dalam segala hal dari pertama hingga akhir penyusunan skripsi ini.
- Orang Tua tercinta yang telah memberikan doa restu dan bantuan moril maupun materil yang tulus dan suci.
- Adikku Siti Nur Cholisyah dan Nadha Anggun Syahbrina yang telah membantu dan memberi semangat, motivasi serta doa yang tak pernah putus untuk Saya.
- Lisa kekasih tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk teman-teman seperjuangan angkatan Manajemen, terima kasih banyak bantuannya selama ini kepada penulis. Hal terindah bisa mengenal kalian, semoga kebersamaan kita tak berhenti sampai disini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini secara teknis maupun materi masih jauh dari sempurna sebagai suatu bentuk karya ilmiah, mengingat keterbatasan kemampuan, serta pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih minim. Meskipun demikian penulis yakin bahwa tulisan ini akan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca. Penulis juga mengharapkan kritik dan saranguna perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin.

Palembang, September 2021

Penulis



M. Agus Noval. S

BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Konsep Teori	10
2.1.1 Manajemen Keuangan	10
2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan	10
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan	11
2.1.1.3 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan	12
2.1.2 Perilaku Keuangan dan Uang	13
2.1.3 Perilaku dan Laporan Keuangan (PLK)	15
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)	17
2.1.5 Solvabilitas Bank (SOLV)	19
2.1.5.1 Mengukur Solvabilitas Bank	21
2.1.6 Nilai Perbankan Indonesia (NPI)	21
2.1.6.1 Rasio Perbankan dan Perbankan Perbankan	22
2.1.6.2 Perbankan dan Perbankan Perbankan	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Berpikir	25

DAFTAR ISI

Judul	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Skripsi	iii
Halaman Pernyataan	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	vii
Abstract	viii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 10
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 Manajemen keuangan	10
2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan.....	10
2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan.....	11
2.1.1.3 Tujuan Menejemen Keuangan	12
2.1.2 Perbankan syariah dan bank syariah	13
2.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)	15
2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR).....	17
2.1.5 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	19
2.1.5.1 Mekanisme Penerbitan SBIS	21
2.1.6 Non Performing Financing (NPF)	21
2.1.6.1 Resiko Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah	22
2.4.6.2 Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah	23
2.2 Penelitian Terdahulu	24
2.3 Kerangka Berfikir	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Objek Penelitian	28
3.2 Desain Penelitian	28
3.3 Operasionalisasi Variabel	28
3.4 Populasi dan Sampel	30
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	31
3.6 Metode Analisis	31
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.6.2 Analisis Regresi Berganda.....	33
3.6.3 Analisis Koefisien Determinasi	34
3.6.4 Uji Hipotesis	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Pofil Singkat Bank Umum Syariah	36
4.1.2 Gambaran Data FDR	38
4.1.3 Gambaran Data CAR	40
4.1.4 Gambaran Data SBIS	41
4.1.5 Gambaran Data NPF	42
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Penguji Asumsi Klasik	44
4.2.1.1 Uji Multikolinearitas	44
4.2.1.2 Uji Heroskedastisitas	45
4.2.1.3 Uji Autokorelasi	46
4.2.1.4 Uji Normalitas	47
4.2.2 Uji Hipotesis	48
4.2.2.1 Uji Secara Simultan.....	48
4.2.2.3 Uji Secara Parsial	49
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	50
4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi	52
BAB V PENUTUP	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan Rata-Rata Nilai FDR,CAR,SBIS dan NPF	6
2.1	Perbedaan Bank Konvensional Dan Syariah	14
2.1	Kriteria Penetapan Peringkat FDR	17
2.2	Kriteria Penetapan Peringkat CAR.....	19
3.1	Operasional Variabel	29
3.2	Daftar Sampel Bank Umum Syariah.....	31
4.1	Profil Singkat BUS yang Terdaftar DI OJK	37
4.2	Perkembangan Nilai FDR BUS yang Terdaftar Di OJK 2016-2020...	39
4.3	Perkembangan Nilai CAR BUS yang Terdaftar Di OJK 2016-2020 ..	40
4.4	Perkembangan Nilai SBIS BUS yang Terdaftar Di OJK 2016-2020 ..	42
4.5	Perkembangan Nilai NPF BUS yang Terdaftar Di OJK 2016-2020 ...	43
4.6	Uji Multikolinearitas.....	44
4.7	Uji Heteroskedastisitas	45
4.8	Uji Autokorelasi.....	46
4.9	Uji Normalitas.....	47
4.10	Uji F	48
4.11	Uji T	49
4.12	Analisis Regresi Berganda	51
4.13	Koefisien Determinasi	52

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Kerangka Berfikir	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perbankan saat ini mengalami peningkatan yang signifikan sesuai dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sejak satu dekade terakhir di Indonesia telah diperkenalkan suatu sistem perbankan dengan metode pendekatan Syariah Islam yang dapat menjadi perbankan alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Gambaran suatu perbankan yang aman, terpercaya dan amanah serta terbebas dari riba sangat dirindukan oleh masyarakat. Karakteristik sistem perbankan Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Perbankan Syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), hingga saat ini perkembangan perbankan Syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan. Perbankan Syariah memasuki dua puluh sembilan tahun terakhir, pasca perubahan UU Perbankan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 10/1998 tentang Perbankan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan Bank Syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, perbankan nasional Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan Konvensional dan sistem perbankan Syariah. Sistem perbankan Konvensional

menggunakan bunga (*interest*) sebagai landasan operasionalnya, sedangkan sistem perbankan Syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai dasar operasionalnya.

Menurut Ascarya (2007), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha seperti investasi, jual beli atau lainnya berdasarkan prinsip Syariah yaitu suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Industri perbankan menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank dalam bentuk tabungan, giro dan simpanan bernilai, yang selanjutnya disalurkan kembali dalam nilai memperoleh profit. Salah satu bentuk penyaluran dana perbankan adalah berupa penyaluran kredit (dalam istilah bank umum) dan pembiayaan (dalam istilah Bank Syariah). Penyaluran dana pembiayaan baik dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan kepada masyarakat baik individu maupun korporasi untuk berbagai peruntukan konsumsi, investasi, modal kerja dan lain-lain selanjutnya akan berpengaruh terhadap gerak roda sektor *real* yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan secara luas diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Perkembangan Bank Umum Syariah saat ini sangatlah pesat seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat yang mementingkan menyimpan dalam bentuk Syariah yang dimana ada sebagian masyarakat berfikir bahwa dengan menyimpan dana di bank Syariah maka tidak adanya riba didalamnya dikarenakan bank Syariah menganut prinsip-prinsip Syariah yang mengedepankan kesyariaan agama.

Di balik pesatnya perkembangan perbankan Syariah di Indonesia dan adanya larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dalam lembaga keuangan Syariah, maka sebagai gantinya dapat menerapkan akad-akad tradisional Islam pada praktiknya. Adapun akad-akad tradisional atau yang lazimnya dikenal dengan akad berdasarkan prinsip Syariah menurut Muhammad Syafi’I Antonio (2001) terdiri dari prinsip titipan atau simpanan (*depository*), bagi hasil (*profit sharing*), sewa menyewa (*operating lease and financial lease*), dan jasa (*feebased service*). Masing-masing akad tersebut sesuai karakteristiknya dapat diterapkan pada operasional perbankan dalam produk penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*), dan jasa (*service*).

Menurut Muhammad (2014), Pembiayaan atau *financing* merupakan istilah yang dipergunakan dalam Bank Syariah, sebagaimana istilah kredit atau *lending* dalam bank konvensional. Pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi, yang berarti bahwa setiap realisasi pembiayaan kepada para debitur, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak Bank Syariah maupun nasabah Bank Syariah.

Bank Umum Syariah juga mendapatkan persetujuan atau telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dimana hal tersebut menjadi jaminan dan nilai *plus* bagi Bank Syariah. Perusahaan dibidang keuangan ataupun perbankan (baik konvensional dan Syariah) harus mendapatkan izin dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan karena otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk

menggantikan peran [Bapepam-LK](#) dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran [Bank Indonesia](#) dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau lebih dikenal dengan pembiayaan *mudharabah dan musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan perjanjian atas sesuatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagi sesuai dengan *nisbah* porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau mengalami kerugian *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* disebut juga *qiradh* yang berarti “memutuskan”. Dalam hal ini, si pemilik modal telah memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk diperdagangkannya berupa barang-barang dan memutuskan sekaligus sebagian dari keuntungan bagi pihak kedua orang yang berakad *qiradh* ini.

Berdasarkan kenyataan di atas, perlu suatu titik temu agar keinginan para pihak tersebut dapat disatukan satu sama lain. Terdapat potensi timbulnya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan bank oleh masyarakat yang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah NPF. NPF adalah pembiayaan bermasalah yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat NPF pembiayaan.

Berdasarkan kualitasnya, pembiayaan bank pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi pembiayaan kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut meliputi waktu

pembiayaan bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci seperti, pembiayaan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dari kriteria kualitas pembiayaan diatas, maka akan dapat menentukan rasio NPF. Semakin tinggi NPF maka semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar, sehingga menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Resiko NPF tersebut harus dapat diatasi sesegera mungkin, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Bank dengan tingkat NPF rendah akan lebih dipercaya oleh masyarakat (nasabahnya) dibandingkan dengan bank yang memiliki tingkat NPF tinggi. Bank juga harus menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah agar tidak terjadi permasalahan. Rasio NPF merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak bank jika terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu berupa restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah sebagai jalan keluar pertama (*first way out*) dan apabila mengalami kegagalan maka dilakukan langkah kedua (*second way out*) berupa eksekusi jaminan.

Terdapat faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya NPF, salah satu dari faktor internal tersebut adalah FDR dan CAR, menurut Dendawijaya (2013), FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, semakin tinggi FDR maka semakin rendah kemampuan likuiditas suatu bank.

Selanjutnya CAR, menurut Kasmir (2017), CAR adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau justru belum memadai. Kemudian Faktor Eksternal dalam penyebab terjadinya NPF adalah SBIS. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang

rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan SBIS ini ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah).

Tabel 1.1
Perkembangan Rata-rata Nilai FDR, CAR, SBIS, dan NPF
Bank Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK
Periode 2016-2020

Tahun	FDR (%)	CAR (%)	SBIS (Miliar Rupiah)	NPF (%)
2016	85,99	16,63	10.788	2,17
2017	79,61	17,91	10.017	2,57
2018	78,61	20,39	8.268	1,95
2019	77,91	20,59	10.386	1,88
2020	76,36	21,64	12.844	1,57

Sumber : www.ojk.go.id (data diolah, 2021)

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata nilai FDR bank syariah di Indonesia untuk tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rata-rata nilai FDR dalam persentase sebesar 85,99%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 79,61%. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 tetap mengalami penurunan menjadi 78,61% tahun 2018 dan 77,91% tahun 2019. Dan pada tahun 2020, rata-rata nilai FDR Bank Syariah di Indonesia tetap mengalami penurunan menjadi 76,36%. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa semakin tinggi rasio FDR maka kemampuan bank akan semakin baik yang mengandung pengertian bahwa bank dapat mengelola fungsi intermediasi secara optimal. Sebaliknya, jika semakin rendah rasio FDR maka artinya bahwa bank tidak dapat mengelola fungsi intermediasinya secara optimal. Akan tetapi, semakin tinggi rasio FDR juga menggambarkan bahwa likuiditas bank menurun karena dana lebih banyak dialokasikan untuk pemberian kredit/ pembiayaan. Sedangkan semakin rendah rasio FDR menunjukkan bahwa bank akan semakin likuid.

Berbanding terbalik dengan rata-rata nilai FDR, rata-rata nilai CAR Bank Syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, rata-rata nilai CAR sebesar 16,63% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 17,91%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 20,39%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun peningkatan tidak terlalu signifikan yaitu menjadi 20,59%. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan yaitu besar nilainya 21,64%.

Sedangkan untuk variabel SBIS mengalami perubahan berfluktuasi dimana pada tahun 2016, rata-rata nilai SBIS (dalam miliar rupiah) sebesar 10.788 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sehingga besarnya menjadi 10.017. Pada tahun 2018, nilai rata-rata SBIS mengalami penurunan yang cukup besar sehingga nilainya menjadi 8.268. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019 rata-rata nilai SBIS mengalami peningkatan yaitu besar nilainya menjadi 10.386. Dan pada tahun 2020 tetap mengalami peningkatan yaitu menjadi 12.844.

Rata-rata nilai NPF Bank Syariah di Indonesia untuk periode penelitian selama 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun. Pada tahun 2016, rata-rata nilai NPF sebesar 2,17% sedangkan pada tahun 2017 sebesar 2,57% sehingga dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2018, rata-rata nilai NPF mengalami penurunan yaitu nilainya menjadi 1,95% dan berlanjut turun hingga ke tahun berikutnya yaitu tahun 2019 (nilainya menjadi 1,88%) dan tahun 2020 (nilainya menjadi 1,57%).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan judul “**Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan peneliti sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah FDR, CAR dan SBIS berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara simultan ?
2. Apakah FDR, CAR dan SBIS berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara parsial ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah FDR, CAR, dan SBIS berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara simultan.
2. Untuk mengetahui apakah FDR, CAR, dan SBIS berpengaruh terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara parsial.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis di bidang ilmu manajemen keuangan khususnya yang berhubungan dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan dan penulis lebih menitik beratkan pada penelitian dengan variabel FDR, CAR, SBIS, dan NPF.

2. Bagi Perusahaan/ Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan/ Bank sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan dan memutuskan kebijakan untuk mengelola FDR, CAR, dan SBIS perusahaan agar dapat digunakan sebagai titik tolak ukur dalam menentukan NPF.

3. Bagi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti lain dengan topik yang sama di bidang manajemen keuangan khususnya FDR, CAR, SBIS, dan NPF.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sekaran (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran berupa pengaruh antara FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF. Didukung oleh teori laporan keuangan, laporan tahunan dari setiap bank syariah yang menjadi objek penelitian serta alat hitung berupa program pengolah data (SPSS 23) untuk membantu menghitung dan mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel dan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang mendekati maupun serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Manajemen Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Dalam setiap perusahaan harus memiliki pola manajemen karena dengan adanya manajemen, perusahaan akan mampu mengatur dan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan tersebut. Manajemen yang harus dimiliki perusahaan terdiri atas manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Salah satu manajemen yang paling penting yang harus dimiliki perusahaan yaitu manajemen keuangan karena keuangan merupakan titik vital perusahaan yang harus terus diperhatikan arus kegiatannya.

Menurut Musthafa (2017), manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen. Sedangkan menurut Fahmi (2011), manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu:

1. Aktivitas penggunaan dana yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
2. Aktivitas perolehan dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan.

3. Aktivitas pengelolaan aktiva yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva harus dikelola seefisien.

Menurut Sutrisno (2007) bahwa manajemen keuangan adalah: “Sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usahausaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan aktivitas perusahaan berupa perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana secara efisien.

2.1.1.2 Fungsi Manajemen Keuangan

Menurut Fahmi (2011) ada 7 Fungsi manajemen keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
2. Penganggaran keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman.
6. Pengendalian keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

7. Pemeriksaan keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

Sedangkan menurut Fahmi (2011), ada 4 macam fungsi manajemen keuangan yaitu diantaranya :

1. Untuk mencapai kesejahteraan pemegang saham secara maksimum.
2. Mencapai keuntungan maksimum dalam jangka panjang.
3. Mencapai hasil manajerial yang maksimum.
4. Mencapai pertanggungjawaban sosial dalam pengertian; peningkatan kesejahteraan dari karyawan korporasi.

2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer keuangan. Untuk mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan banyak keputusan keuangan yang perlu diambil oleh manajer keuangan. Keputusan keuangan dapat diambil dengan benar apabila hal tersebut sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perusahaan.

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2015), secara umum tujuan manajemen keuangan dalam jangka pendek adalah menghasilkan laba yang optimal agar para pemilik dapat menerima *return* yang lebih besar dari investasi yang dilakukan perusahaan selama kegiatan operasionalnya. Namun secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan.

2.1.2 Perbankan Syariah dan Bank Syariah

Perbankan merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, menyalurkan uang dan memberikan pelayanan penerimaan uang, pada dasarnya fungsi tersebut sudah dilaksanakan dari zaman Rasulullah SAW walaupun belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa secara substansial fungsi bank ketika zaman Rasulullah SAW sudah ada.

Dalam Pasal 1 Undang-undang No 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank terdiri dari 2 jenis jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip Syariah.

Secara pandangan masyarakat awam, Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki perbedaan yang mendasar yaitu prinsip dasar yang dianut oleh kedua bank tersebut. Dalam segi kegiatan utama, bank Syariah memiliki kegiatan utama yang selalu terkait dengan masalah uang menurut Imamudin (2002) antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga
- e. Membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang
- f. Memberi jaminan bank

Secara umum, menurut Antonio (2001) perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank Konvensional	Bank Syariah
Investasi yang halal dan haram	Melakukan investasi-investasi yang halal saja
<i>Memake</i> metode bunga	Berdasarkan prinsip bagi hasil
<i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan falah oriented</i>
Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang peroperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam.

Terkait dengan asas operasional bank syariah , berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 21 tahun 2008, disebutkan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip Syariah dan demokrasi. Namun ada prinsip hukum Islam yang melarang adanya beberapa unsur transaksi perbankan berikut :

1. Perniagaan barang yang berunsur haram.
2. Bunga (riba).
3. Perjudian atau spekulasi yang disengaja (maisir).
4. Ketidak jelasan dan manipulasi (gharar).

Bank Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan prinsip Syariah atau prinsip Islami. Sudarsono (2015), mendefinisikan Bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan Kasmir (2017) menjelaskan bahwa bank Syariah merupakan bentuk dari bank modern yang berdasarkan pada hukum Islam yang sah dikembangkan pada abad pertama Islam. Bank ini menggunakan konsep berbagi resiko sebagai suatu metode utama yang meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian atau keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada perbankan Syariah produk yang dihasilkan tidak terlalu berbeda dengan perbankan konvensional. Berikut beberapa bentuk produk jasa yang ada pada perbankan syariah (Bank Indonesia):

- a) Titipan atau simpanan : Al-Wadi'ah (jasa penitipan), Deposito Mudharabah
- b) Bagi hasil : Al-Musyarakah (Joint Venture), Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah
- c) Jual beli : Bai' Al-Murabahah, Bai' As-Salam, Bai' Al-Istishna', Al-Ijarah, Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik
- d) Jasa : Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn, Al-Qardh

2.1.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Dalam menilai kinerja keuangan, baik perusahaan maupun bank diharuskan untuk mengetahui nilai dari setiap rasio yang berlaku di laporan keuangan yang digunakan sebagai faktor penilaian kebijakan apa yang harus diambil oleh setiap manajer. Menurut Kasmir (2017), FDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan dibandingkan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank yang sekaligus memberikan kontribusi pendapat terbesar bagi bank. Semakin banyak

pembiayaan yang disalurkan maka semakin likuid suatu bank karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit/ pembiayaan sehingga tidak terdapat dana untuk dipinjamkan lagi untuk diinvestasikan.

Farida (2017) menjelaskan secara sederhana yang dimaksud dengan FDR yaitu rasio yang mengukur seberapa besar persentase dari aset yang dimiliki oleh bank Syariah yang digunakan untuk penyaluran dana melalui pembiayaan. Rasio ini mampu menunjukkan kemampuan perbankan menghubungkan depositan dengan debitur sehingga semakin tinggi nilai FDR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan menjadi naik. Sebaliknya, jika FDR mengalami penurunan maka pembiayaan yang akan disalurkan juga akan mengalami penurunan. Dalam hal ini salah satu pembiayaan tersebut adalah pembiayaan *murabahah*.

Sedangkan menurut Muhammad (2014), FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank maka berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil.

Suryani (2011) menyatakan bahwa standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%) maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun karena fungsi utama dari bank adalah sebagai *intermediasi* (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang

dihimpun. Semakin tinggi FDR maka semakin baik kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurang efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio FDR bank berada pada standar yang ditetapkan oleh BI maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dalam asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan dengan efektif).

Dari penjelasan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa FDR adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan seberapa besar dana pihak ketiga (DPK) bank Syariah yang disalurkan untuk pembiayaan.

Rumus yang digunakan sesuai SE No. 6/23/DPNP Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yaitu sebagai berikut :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan atau Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat FDR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$\text{FDR} \leq 75\%$
2	Sehat	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
3	Cukup Sehat	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
4	Kurang Sehat	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	Tidak Sehat	$\text{FDR} > 120\%$

2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.

Menurut Muhammad (2014), bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan

keadaan yang dinyatakan dengan suatu rasio yang disebut rasio kecukupan modal atau CAR. Vithzal Rivai (2013) menyebutkan bahwa CAR sebagai salah satu indikator kemampuan bank dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank. Besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risiko masing-masing.

Sedangkan Mizan (2017), mengatakan bahwa CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan.

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2013).

CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$CAR > 11\%$
2	Sehat	$9,5\% \leq CAR < 11\%$
3	Cukup Sehat	$8\% \leq CAR < 9,5\%$
4	Kurang Sehat	$6,5\% \leq CAR < 8\%$
5	Tidak Sehat	$CAR \leq 6,5\%$

Sumber : Lampiran SEBI No. 9/24/DPbs Tahun 2007

2.1.5 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/11/2008 pasal 3, tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah, SBIS adalah sertifikat yang diterbitkan bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana jangka pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya SBIS ini menggunakan akad *ju'alah*. Menurut bahasa, *ju'alah* adalah upah atas suatu prestasi baik prestasi itu dicapai karena tugas tertentu yang diberikan kepadanya atau prestasi karena ketangkasan yang ditunjukkannya dalam suatu perlombaan.

SBIS mempunyai fungsi untuk membantu bank Syariah di Indonesia yang kelebihan likuiditas, untuk menyimpan dana menganggurnya di tempat yang aman dan menguntungkan. Untuk mendukung kegiatan usaha perbankan yang terkait dengan SBIS, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia, sebelum tahun 2008 SBIS dikenal dengan nama SWBI atau Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bank Indonesia selaku Bank Sentral boleh menerbitkan instrument moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI;
2. Akad yang digunakan untuk SWBI adalah Wadi'ah sebagaimana yang diatur fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan;

3. SWBI tidak boleh ada imbalan yang di syaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia;
4. SWBI boleh diperjualbelikan.

Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas titipan dana yang diperhitungkan jika pada saat jatuh tempo. Jumlah dana yang dapat dititipkan ke bank Indonesia sekurang-kurangnya Rp 500.000.00,00. Pada titipan dana tersebut hanya dapat dilakukan dalam kelipatan Rp 50.000.000,00. Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia diatur dalam PBI No. 2/9/2000 tanggal 23 Februari 2000, PBI No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas PBI No.2/9/2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Maret 2008 dikeluarkanlah peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang perubahan nama SWBI menjadi SBIS dengan adanya perubahan nama tersebut akad yang digunakan dalam transaksi SWBI menjadi lebih luas tidak hanya berakad *wadiah* melainkan dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *qardh*, dan *jualah* sehingga bonus yang diberikan dapat mendekati bonus yang diberikan SBI dengan skim bunga. SBIS merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang diatur oleh Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Negara. Peraturan Bank Indonesia No.10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008, SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *Jualah*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*. Bank Indonesia dalam operasi moneternya melalui penerbitan SBIS mengumumkan target penyerapan likuiditas kepada bank-bank syariah sebagai upaya pengendalian moneter dan menjanjikan imbalan tertentu bagi yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai imbalan SBIS adalah dengan cara bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan pada saat jatuh waktu SBIS.

Ketentuan hukum SBIS adalah sebagai berikut:

1. SBIS sebagai instrument pengendalian moneter boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT);
2. Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan;
3. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh tempo;
4. Bank syariah boleh memiliki SBIS untuk memanfaatkan dananya yang belum dapat disalurkan ke sektor riil.

2.1.5.1 Mekanisme Penerbitan SBIS

Mekanisme penerbitan SBIS adalah melalui lelang. Dalam hal penerbitan SBIS melalui lelang telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/16/DPM pada 31 Maret 2008.

Berikut prosedur pelaksanaan transaksi SBIS dengan sistem pelelangan.

1. Bank Indonesia memberitahukan dan menetapkan waktu pengajuan lelang, imbalan, jangka waktu, dan sebagainya kepada BUS, UUS, atau pialang atas nama BUS dan UUS.
2. BUS, UUS dan Pialang atas nama BUS/UUS mengajukan penawaran pembelian Sertifikat Bank Indonesia Syariah ke Bank Indonesia.
3. Dewan Gubernur 4 memutuskan pemenang lelang.
4. Bank Indonesia melakukan perhitungan tingkat imbalan SBIS dan mendebet saldo rekening giro pada BUS, UUS, atau Pialang yang memenangkan lelang SBIS tersebut.

5. Setelah jatuh tempo Bank Indonesia membayar SBIS tersebut dengan mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal + imbalan dalam rangka setelemen dana.

2.1.6 *Non Performing Financing (NPF)*

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2013). Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Jika tingkat NPF di sebuah bank tinggi maka ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang buruk. BI memberikan batas maksimal NPF *gross* bagi bank syariah sebesar 5%. NPF *gross* terdiri dari pembiayaan bermasalah yang digolongkan dalam beberapa tingkatan kolektibilitas.

Kolektibilitas adalah penggolongan kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh bank. Tingkat kolektibilitas dibagi menjadi lima jenis, yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Usaha yang dapat dilakukan bank syariah dalam menekan kemungkinan timbulnya pembiayaan bermasalah adalah dengan menjaga kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan dapat diukur dengan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *collateral*, *capital*, dan *condition of economy* (Antonio, 2014).

NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Setiawan, 2013). NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Bertambahnya NPF

akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Wibowo, 2013).

2.1.6.1 Resiko Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah (*Financing Risk*)

Resiko pembiayaan adalah resiko kerugian yang diderita oleh bank yang terkait dengan kegagalan nasabah dalam melunasi pembiayaannya atau pinjamannya. Ali (2016) mendefinisikan bahwa risiko pembiayaan (*financing risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Pembiayaan bermasalah (NPF) pada perbankan syariah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat melunasi pinjaman pembiayaan terhadap bank tepat waktu dan hal ini biasanya akan merugikan bank tersebut.

2.1.6.2 Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (Kasmir, 2017) yaitu:

➤ Faktor Internal

- a. Unsur Tenaga Profesional Kredit bermasalah dapat timbul karena faktor sumber daya manusia yang kurang memadai, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat berakibat pada proses pemberian dan pemantauan kredit tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. Pemenuhan Ketentuan, Kebijakan dan Prosedur Kredit Proses perkreditan harus dilaksanakan sesuai undang – undang, kebijakan dan prosedur yang berlaku yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Serta perlu berpedoman terhadap kebijakan dan prosedur perkreditan yang ditetapkan oleh manajemen bank yang bersangkutan dengan memperhatikan: prinsip-prinsip perkreditan, strategi dan target yang akan dicapai, tata cara

(prosedur) yang dianggap paling efisien dan efektif, praktek-praktek yang sehat dalam dunia usaha.

Ketentuan – ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses penyediaan kredit, proses penilaian kembali fasilitas kredit, pemantauan dan penagihan kredit. Pelanggaran terjadi dikarenakan adanya kelemahan dalam pelaksanaannya, misalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang baik, dan adanya masalah pada fasilitas pendukung.

➤ Faktor Eksternal

- a. Kebijakan pemerintah (sosial, politik, ekonomi) yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan.
- b. Terjadinya bencana, kerusakan, dll. yang merusak/menghancurkan usaha debitur.
- c. Itikad debitur tidak baik (buruk).
- d. Fasilitas kredit disalah gunakan.
- e. Pemalsuan usaha.
- f. Agunan yang digunakan bukan milik debitur sendiri (milik pihak ke-3).
- g. Debitur tidak bertanggung jawab terhadap kreditnya (menghilang).
- h. Kesalahan manajemen (mis management).
- i. Debitur melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.
- j. Adanya tekanan yang dilakukan oleh penguasa (kredit tuntas).
- k. Jaminan tidak memadai atau sulit dijual, sehingga sulit dilikuidasi.

Perhitungan NPF menurut Kasmir (2017) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF adalah sebagai berikut :

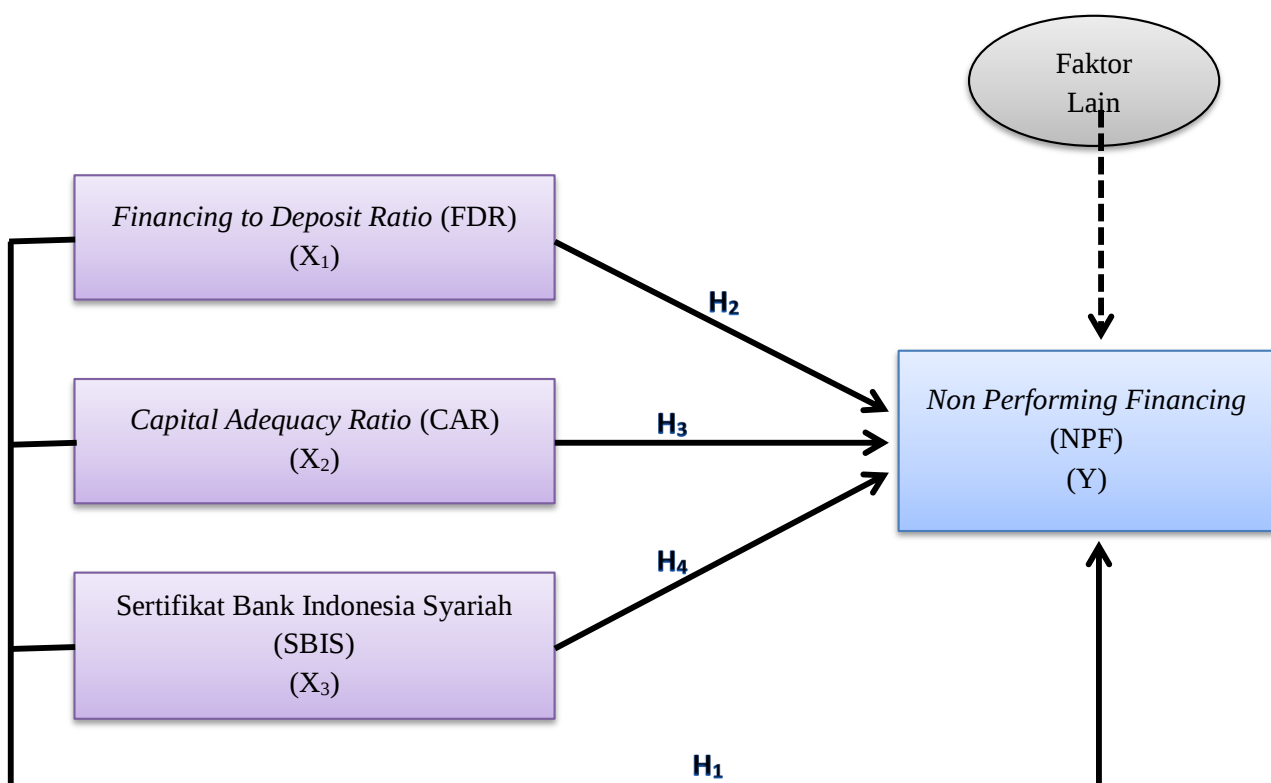
1. Wahyuni (2019) dalam skripsi yang berjudul Pengaruh CAR, FDR, dan NPF terhadap Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap tahun 2014 – 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap serta dalam menentukan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dan didapatkan bahwa sampelnya yaitu laporan keuangan bulanan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Suriyah Cilacap. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian secara simultan, variabel dependen (pembiayaan *murabahah*) dapat dijelaskan oleh variabel independen (CAR, FDR, dan NPF) dengan nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sedangkan secara parsial, variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* serta variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dengan nilai signifikansi CAR lebih besar dari 0,05 ($0,616 > 0,05$), nilai signifikansi FDR lebih besar dari 0,05 ($0,884 > 0,05$) dan nilai signifikansi NPF lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).
2. Karnila (2017) dalam skripsi yang berjudul Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia periode 2008 – 2016. Populasi dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2016 dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan periode Maret 2008 sampai dengan Desember 2016. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis (uji F dan uji t). Hasil dari penelitian variabel SBIS tidak

berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan perbankan syariah karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,404 > 0,05$). Variabel DPK berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan perbankan syariah karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Variabel SBIS dan DPK berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan perbankan syariah dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

2.3 Kerangka Berfikir

NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah, hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan konsep-konsep dasar teori dan penelitian terdahulu, maka faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai indikator terjadinya NPF adalah FDR, CAR, dan SBIS. Kerangka pemikiran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Gambar 2.1 menjelaskan hipotesis dalam penelitian ini. Ketiga variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) yaitu FDR, CAR, dan SBIS akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap variabel dependen (Y) yaitu NPF. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H_0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari FDR, CAR dan SBIS terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara simultan maupun parsial.
- H_1 = Ada pengaruh yang signifikan dari FDR, CAR dan SBIS terhadap NPF pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia secara simultan maupun parsial.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

3.2 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dimana penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan atau gambaran secara terperinci terhadap suatu keadaan tanpa ada perlakuan yang berbeda terhadap objek yang diteliti. Adapun gambaran secara terperinci mengenai penelitian ini akan dijelaskan dengan mengukur pengaruh FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF.

3.3 Operasional Variabel

Menurut Juliansyah Noor (2011), variabel penelitian pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu: variabel independen yang terdiri dari FDR, CAR dan SBIS serta variabel dependen yang terdiri dari NPF. Pada Tabel 3.1. ditunjukkan deskripsi dari operasional variabel pada penelitian ini.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	28 us	Skala
FDR	Rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2013)	$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$	Rasio
CAR	Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank (Dendawijaya, 2013)	$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva tertimbang menurut risiko}} \times 100\%$	Rasio

SBIS	Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	<i>Learn SBIS</i>	Rupiah
NPF	Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2013)	$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan BUS yang terdaftar serta memiliki kelengkapan data di OJK. Sedangkan yang menjadi sampel adalah laporan keuangan BUS periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Adapun laporan keuangan BUS yang menjadi sampel dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Daftar Sampel Bank Umum Syariah

No.	Nama Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank BRI Syariah
5	PT. Bank BNI Syariah
6	PT. Bank BCA Syariah
7	PT. Bank Syariah Bukopin
8	PT. Bank Victoria Syariah
9	PT. Maybank Syariah Indonesia
10	PT. Bank Panin Syariah

Sumber : www.ojk.go.id

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari data laporan keuangan tahunan BUS periode tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data dengan cara mencari melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website resmi dari setiap bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

3.6 Metode Analisis

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah antar variabel. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : menguji terlebih dahulu data tersebut dalam rangka untuk menganalisis pengaruh-pengaruh.

- **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen (X). Apabila terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolonieritas yang harus diatasi. Hasil pengujian yang baik adalah tidak terdapat multikolonieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilakukan pengujian dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan Tolerance dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak semua pengamatan didalam model regresi. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode uji Glejser. Pengujian dengan menggunakan metode uji Glejser yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai absolute residual yang didapat lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

- **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan pendekatan Uji *Durbin-Watson* (d). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut :

1. $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
2. $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.

3. $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson.

▪ Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan catatan mulai SPSS versi 25 metode uji normalitas menggunakan Test Statistics dan nilai signifikansi yang dikoreksi dengan metode Lilliefors.

3.6.2 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam model ini terdapat dua variabel, yaitu :

1. Variabel Independen
 - a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
 - b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)
 - c. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
2. Variabel Dependen
 - *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun rumus yang digunakan dari regresi linier berganda ini yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana :

$Y = \text{Non Performing Financing (NPF)}$

$a = \text{Konstanta}$

$b = \text{Koefisien regresi}$

$X_1 = \text{Financing to Deposit Ratio (FDR)}$

$X_2 = \text{Capital Adequacy Ratio (CAR)}$

$X_3 = \text{Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)}$

$e = \text{Standard error}$

3.6.3 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R^2 semakin besar (mendekati 1), maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y). Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

Sebaliknya, jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel (Y) semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat hasil statistik regresi, yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah *financing to deposit ratio* (X_1), *capital adequacy ratio* (X_2), dan sertifikat bank Indonesia syariah (X_3) sebagai variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *non performing financing* yang menjadi variabel dependen (Y).

3.6.4 Uji Hipotesis

▪ Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (uji F) digunakan untuk melihat apakah apakah FDR (X_1), CAR (X_2), dan SBIS (X_3) yang menjadi variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF sebagai variabel dependen (Y).

Melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 : $b_1b_2b_3 = 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

H_a : $b_1b_2b_3 \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $\text{Sig.F} \geq 0,05$

H_1 diterima jika $\text{Sig.F} < 0,05$

▪ Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (uji t) digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

H_0 : $b_1 = 0$, artinya FDR tidak ada pengaruh terhadap NPF.

H_1 : $b_1 \neq 0$, artinya FDR berpengaruh terhadap NPF.

H_0 : $b_2 = 0$, artinya CAR tidak ada pengaruh terhadap NPF.

H_2 : $b_2 \neq 0$, artinya CAR berpengaruh terhadap NPF.

H_0 : $b_3 = 0$, artinya SBIS tidak ada pengaruh terhadap NPF.

H_3 : $b_3 \neq 0$, artinya SBIS berpengaruh terhadap NPF.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 10 Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia selama tahun 2016-2020 sehingga jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 data. Data yang diperoleh dari situs (website) resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan Bank Indonesia (www.bi.go.id). Data yang digunakan berupa laporan tahunan BUS tercatat yang meliputi laporan keuangan khususnya rasio-rasio keuangan dari tahun 2016-2020. Sebelum membahas mengenai pengaruh FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF, terlebih dahulu akan dibahas mengenai profil BUS dan gambaran mengenai FDR, CAR, SBIS, dan NPF pada masing-masing BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2016-2020.

4.1.1 Profil Singkat Bank Umum Syariah

Adapun profil singkat masing-masing BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2016-2020 yang terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Profil Singkat BUS yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

No.	Nama BUS	Profil Bank Umum Syariah
1	PT. Bank Muamalat Syariah	- Tanggal berdiri : 01 Mei 1992 - Tanggal beroperasi bank syariah : 27 Oktober 1994 - Pendiri : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pengusaha muslim - Visi : <i>“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”</i>
2	PT. Bank Mandiri Syariah	- Tanggal berdiri : 25 Oktober 1999 - Tanggal beroperasi bank syariah : 01 November 1999 - Nama awal : Bank Susila Bakti - Pemilik : Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestas - Visi : <i>“Bank Syariah Terdepan dan Modern”</i>
3	PT. Bank Mega Syariah	- Tanggal berdiri : 14 Juli 1990 - Tanggal beroperasi bank syariah : 25 Agustus 2004 - Nama awal : PT. Bank Umum Tugu (Bank Tugu) - Visi : <i>“Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”</i>
4	PT. Bank BRI Syariah	- Tanggal berdiri : 03 April 1969 - Tanggal beroperasi bank syariah : 17 November 2008 - Nama awal : PT. Bank Djasa Arta - Visi : <i>“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”</i>
5	PT. Bank BNI Syariah	- Tanggal berdiri : 05 Juli 1946 - Tanggal beroperasi bank syariah : 09 April 2000 - Visi : <i>“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”</i>

6	PT. Bank BCA Syariah	- Tanggal berdiri : 12 Juni 2009 - Tanggal beroperasi bank syariah : 05 April 2010 - Nama awal : PT. Bank Utama Internasional Bank - Visi : “Menjadi bank syariah andalan dan pilihan masyarakat”
7	PT. Bank Bukopin Syariah	- Tanggal berdiri : 2001 - Tanggal beroperasi bank syariah : 09 Desember 2008 - Nama awal : PT. Bank Persyarikatan Indonesia - Visi : “Menjadi bank syariah pilihan yang terus tumbuh dan kuat”
8	PT. Bank Victoria Syariah	- Tanggal berdiri : 15 April 1966 - Tanggal beroperasi bank syariah : 01 April 2010 - Nama awal : PT. Bank Swaguna - Visi : “Menjadi bank syariah yang amanah, adil, dan peduli lingkungan”
9	PT. Maybank Syariah	- Tanggal berdiri : 15 Mei 1959 - Nama awal : PT. Bank Internasional - Visi : “Menjadi penyedia layanan keuangan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkomitmen penuh dan inovatif untuk menciptakan nilai dan melayani komunitas”
10	PT. Bank Panin Syariah	- Tanggal berdiri : 08 Januari 1972 - Tanggal beroperasi bank syariah : 02 Desember 2009 - Visi : “Menjadi bank syariah progresif di Indonesia yang menawarkan produk dan layanan keuangan komprehensif dan inovatif”

Sumber : <http://www.ojk.go.id> (2021)

4.1.2 Gambaran Data FDR

Penting bagi suatu usaha baik itu usaha perbankan maupun jenis usaha lainnya mengetahui tingkat FDR yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut. Dengan mengetahui tingkat FDR, maka manajemen suatu perusahaan dapat menilai kinerjanya serta dapat mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan hidup jangka panjangnya. Demikian juga halnya dengan usaha perbankan.

FDR merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dibenahi. Kewajiban tersebut berupa *Call Money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. FDR adalah rasio yang menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Sultan, 2014).

Berikut merupakan tabel mengenai perkembangan nilai FDR pada 10 BUS yang menjadi sampel penelitian dengan periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.2
Perkembangan Nilai FDR BUS yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020
(dalam persentase %)

No.	Nama Bank	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Muamalat Syariah	95,13	84,41	73,18	73,51	69,84
2	PT. Bank Mandiri Syariah	79,19	77,66	77,25	75,54	73,98
3	PT/ Bank Mega Syariah	95,24	91,05	90,88	94,53	63,94
4	PT. Bank BRI Syariah	81,47	71,87	86,11	77,91	77,61
5	PT. Bank BNI Syariah	84,57	80,21	79,62	74,31	668,79
6	PT. Bank BCA Syariah	90,10	88,5	89,0	91,0	81,32
7	PT. Bank Bukopin Syariah	88,18	82,44	93,40	93,59	181,84
8	PT. Bank Victoria Syariah	100,67	83,59	82,78	73,81	76,21
9	PT. Maybank Syariah	134,73	85,94	424,53	506,00	0,16
10	PT. Bank Panin Syariah	91,99	86,95	88,82	96,23	111,71

Sumber : Annual Report Bank Umum Syariah, data diolah (2021)

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat nilai FDR pada masing-masing BUS berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Terdapat 3 BUS dimana nilai FDR-nya berfluktuasi tajam yaitu PT. Bank Mega Syariah dimana dari tahun 2016 mengalami penurunan sampai tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 94,53%, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 63,94%. Selanjutnya PT. Bank Bukopin Syariah yang dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 82,44%, akan tetapi langsung mengalami kenaikan ditahun selanjutnya mulai dari tahun 2018 sampai tahun

2020. Sedangkan bank dengan nilai FDR yang mengalami penurunan adalah PT. Bank Muamalat Syariah, PT. Bank Mandiri Syariah, dan PT. Bank BNI Syariah.

4.1.3 Gambaran Data CAR

CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber diluar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2013).

Berikut merupakan tabel mengenai perkembangan nilai CAR pada 10 BUS yang menjadi sampel penelitian dengan periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.3
Perkembangan Nilai CAR BUS yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020
(dalam persentase %)

No.	Nama Bank	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Muamalat Syariah	12,74	13,62	12,34	12,42	15,21
2	PT. Bank Mandiri Syariah	14,01	15,89	16,26	16,15	16,88
3	PT/ Bank Mega Syariah	25,53	22,19	20,54	19,96	24,15
4	PT. Bank BRI Syariah	20,63	20,29	22,89	23,40	24,25
5	PT. Bank BNI Syariah	14,92	20,14	19,31	18,88	21,36
6	PT. Bank BCA Syariah	36,72	29,4	24,3	38,28	45,26
7	PT. Bank Bukopin Syariah	17,13	8,00	19,31	15,25	15,08
8	PT. Bank Victoria Syariah	15,98	19,29	22,07	18,04	22,78
9	PT. Maybank Syariah	55,06	75,83	163,07	241,84	330,84
10	PT. Bank Panin Syariah	18,17	11,51	23,15	14,46	31,43

Sumber : Annual Report Bank Umum Syariah, data diolah (2021)

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat nilai CAR pada masing-masing BUS berfluktuasi. Terdapat satu BUS yang memiliki nilai CAR meningkat setiap tahunnya yaitu PT. Maybank Syariah dimana pada tahun 2016 nilai CAR sebesar 55,06% dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 75,83%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan lagi menjadi 163,07% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 241,84% serta pada tahun 2020 tetap mengalami peningkatan lagi yaitu menjadi 330,84%.

4.1.4 Gambaran Data SBIS

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan SBIS ini ditujukan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah).

Berikut merupakan tabel mengenai perkembangan nilai SBIS pada bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian dengan periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.4
Perkembangan Nilai SBIS BUS yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020
(dalam miliaran rupiah)

Tahun	Nilai SBIS
2016	10.788
2017	10.017
2018	8.268
2019	10.386
2020	12.844

Sumber : www.ojk.go.id (2021)

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat nilai SBIS pada BUS berfluktuasi. Pada tahun 2016 nilai SBIS BUS sebesar 10.788 (miliar rupiah) dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 10.017 (miliar rupiah). Pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 8.268 (miliar

rupiah), akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 10.386 (miliar rupiah) dan pada tahun 2020 tetap mengalami peningkatan lagi menjadi 12.844 (miliar rupiah).

4.1.5 Gambaran Data NPF

NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipengaruhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank (Mulyono, 2013). NPF adalah jumlah kredit yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Setiawan, 2013). NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Berikut merupakan tabel mengenai perkembangan nilai NPF pada 10 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian dengan periode tahun 2016-2020.

Tabel 4.5
Perkembangan Nilai NPF BUS yang Terdaftar di OJK Periode 2016-2020
(dalam persentase %)

No.	Nama Bank	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PT. Bank Muamalat Syariah	1,40	2,75	2,58	4,30	3,95
2	PT. Bank Mandiri Syariah	3,13	2,71	1,56	1,00	0,72
3	PT/ Bank Mega Syariah	2,18	2,95	2,15	2,49	1,38
4	PT. Bank BRI Syariah	3,19	4,72	2,85	3,23	3,22
5	PT. Bank BNI Syariah	1,64	1,50	1,52	1,44	1,35
6	PT. Bank BCA Syariah	0,21	0,04	0,28	0,26	0,01
7	PT. Bank Bukopin Syariah	2,74	4,18	3,65	4,18	4,92
8	PT. Bank Victoria Syariah	4,35	4,08	3,41	3,42	3,34
9	PT. Maybank Syariah	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PT. Bank Panin Syariah	1,85	4,83	3,84	2,80	2,45

Sumber : Annual Report Bank Umum Syariah, data diolah (2021)

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat nilai NPF pada masing-masing BUS berfluktuasi. Terdapat satu BUS yang memiliki nilai NPF menurun drastis selama periode penelitian yaitu PT. Maybank Syariah dimana pada tahun 2016 nilai NPF sebesar 4,60%. Sedangkan pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun 2016 yaitu menjadi 0,00%.

4.2 Analisis Data

Pada analisis data terlebih dahulu diadakan pengujian asumsi klasik terhadap model yang digunakan dalam penelitian ini apakah layak atau tidak. Pengujian asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam rangka menganalisis data-data yang diperoleh apakah terdapat atau tidak penyimpangan terhadap asumsi-asumsi klasik. Hasil dari pengujian yang baik adalah tidak terdapatnya penyimpangan terhadap asumsi klasik yang diujikan.

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji asumsi yang digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen (X). Hasil pengujian yang baik adalah tidak terdapat multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan pengujian dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance* dari hasil analisis regresi. Jika nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,1$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas pada penelitian ini.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.595	1.413		1.836	0.073		
FDR	.015	.002	.099	2.720	.002	.904	1.106
CAR	.031	.004	.422	3.052	.004	.896	1.116
SBIS	3.223E-5	.000	.032	.240	.811	.985	1.016

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Lampiran SPSS 23 (data diolah)

Berdasarkan hasil output pada table 4.6 diketahui bahwa nilai VIF yang diperoleh masing-masing variabel sebesar $X_1 = 1,106$; $X_2 = 1,116$; dan $X_3 = 1,016$. Dari hasil tersebut nilai $VIF < 10$ dan nilai *Tolerance* ketiga variabel lebih dari 0,1 yaitu sebesar $X_1 = 0,904$; $X_2 = 0,896$; dan $X_3 = 0,985$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas.

4.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji heteroskedastisitas yaitu untuk mengetahui ada tidaknya ketidaksamaan varian dan residual dari pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Pada regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode uji Glejser. Pengujian dengan menggunakan metode Glejser yaitu meregresikan variabel independen dengan nilai absolute residualnya. Jika nilai *absolute* residual yang didapat lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Untuk hasil pengujian pada penelitian ini dengan menggunakan metode Glejser yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.615	.775		.793	.432
FDR	.001	.001	.141	1.926	.221
CAR	.001	.002	.072	1.470	.731
SBIS	5.976E-5	.000	.118	.811	.422

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Lampiran SPSS 23 (data diolah)

Dari hasil output pada tabel 4.7 diatas dapat diketahui yaitu pada variabel FDR (X_1) yang nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,221 > 0,05$). Untuk variabel CAR (X_2) yang nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,731 > 0,05$). Untuk variabel SBIS (X_3) yang nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,422 > 0,05$). Dari nilai-nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk memeriksa ada tidaknya autokorelasi, maka digunakan pendekatan Uji *Durbin-Watson* (d).

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut.

1. $DU < DW < 4 - DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.
2. $DW < DL$ atau $DW > 4 - DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi.
3. $DL < DW < DU$ atau $4 - DU < DW < 4 - DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson.

Berikut hasil pengujian autokorelasi pada penelitian ini yang menggunakan pendekatan Uji Durbin Watson.

Tabel 4.8 Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.460 ^a	.711	.503	1.38525	1.858

a. Predictors: (Constant), SBIS, FDR, CAR

b. Dependent Variable: NPF

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Dari hasil output pada tabel 4.8 diatas diketahui bahwa nilai DW yang diperoleh sebesar 1,858. Untuk nilai DL (batas bawah) dan DU (batas atas) dilihat berdasarkan tabel Durbin Watson dengan jumlah data (n=50) dan jumlah variabel X dalam penelitian ini yaitu k=3, maka diperoleh nilai DL=1,4206 dan nilai DU=1,6739. Jadi nilai 4-DU = 2,3261. Berdasarkan output diatas dapat diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,858, karena nilai DW terletak antara DU dan 4-Du ($1,6739 < 1,858 < 2,3261$) maka disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.2.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas penelitian ini menggunakan pendekatan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5% (0,05) maka jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) diatas nilai signifikan 5% artinya variabel residual berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.9 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34217920
	Most Extreme Absolute Differences	.076
	Positive	.076
	Negative	-.073
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Dari hasil output diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual antara variabel FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF terdistribusi dengan normal atau data pada penelitian ini terdistribusi normal. Dengan catatan mulai SPSS versi 22 metode uji normalitas menggunakan *Test Statistics* dan nilai signifikansi yang dikoreksi dengan metode Lilliefors.

4.2.2 Uji Hipotesis

4.2.2.1 Uji secara Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah FDR (X_1), CAR (X_2), dan SBIS (X_3) yang menjadi variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF sebagai variabel dependen (Y). Adapun pengujian dengan langkah-langkah berikut :

$H_0 : b_1b_2 = 0$, artinya variabel bebas tidak berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

$H_a : b_1b_2 \neq 0$, artinya variabel bebas berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Kriteria pengujian :

- H_0 diterima jika $\text{Sig.F} \geq 0,05$
- H_0 ditolak jika $\text{Sig.F} < 0,05$

Tabel 4.10 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.633	3	7.878	4.105	.001 ^b
	Residual	88.271	46	1.919		
	Total	111.904	49			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), SBIS, FDR, CAR

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Dari hasil output pada tabel 4.10 diatas diketahui nilai F hitung yang diperoleh sebesar 4,105 dengan signifikansi 0,001. Untuk menentukan nilai pada F tabel dengan melihat pada tabel statistik (lihat lampiran) pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 = 3 , dan df 2 (n-k-1) atau 50-3-1 = 46, hasil yang diperoleh untuk F tabel sebesar 2,81. Dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu $4,105 > 2,81$ dan signifikansi lebih kecil ($0,001 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Artinya bahwa FDR, CAR, dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada BUS yang terdaftar di OJK.

4.2.2.2 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji parsial atau uji t digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut :

$H_0 : b_1 = 0$, artinya FDR tidak ada pengaruh terhadap NPF.

$H_1 : b_1 \neq 0$, artinya FDR berpengaruh terhadap NPF.

$H_0 : b_2 = 0$, artinya CAR tidak ada pengaruh terhadap NPF.

$H_2 : b_2 \neq 0$, artinya CAR berpengaruh terhadap NPF.

$H_0 : b_3 = 0$, artinya SBIS tidak ada pengaruh terhadap NPF.

$H_3 : b_3 \neq 0$, artinya SBIS berpengaruh terhadap NPF.

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $\text{Sig.}t \geq 0,05$

H_1 diterima jika $\text{Sig.}t < 0$,

Tabel 4.11 Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.595	1.413		1.836	.073
FDR	.015	.002	.099	2.720	.002
CAR	.031	.004	.422	3.052	.004
SBIS	3.223E-5	.000	.032	.240	.811

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Berdasarkan pada table 4.11 diatas maka dapat diketahui bahwa :

- Variabel FDR memiliki nilai t_{hitung} 2,720 dengan nilai signifikan 0,002. t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($50-3-1 =$

46) maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,6787. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($2,720 > 1,6787$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka dapat disimpulkan H_1 diterima. Artinya bahwa FDR secara parsial berpengaruh terhadap NPF. Nilai t_{hitung} positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika FDR meningkat maka NPF juga akan meningkat.

- Variabel CAR memiliki nilai t_{hitung} 3,052 dengan nilai signifikan 0,004. t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($50-3-1 = 46$) maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,6787. Dengan nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($3,052 > 1,6787$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$) maka dapat disimpulkan H_2 diterima. Artinya bahwa CAR secara parsial berpengaruh terhadap NPF. Nilai t_{hitung} positif artinya berpengaruh positif, yaitu jika CAR meningkat maka NPF juga akan meningkat.
- Variabel SBIS memiliki nilai t_{hitung} 0,240 dengan nilai signifikan 0,811. t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ ($50-3-1 = 46$) maka hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} sebesar 1,6787. Dengan nilai t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0,240 < 1,6787$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,811 > 0,05$) maka dapat disimpulkan H_0 diterima. Artinya bahwa SBIS secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF.

4.2.3 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Adapun persamaan yang digunakan pada regresi linier berganda.

$$Y = a + b X_1 + b X_2 + b X_3 + e$$

Tabel 4.12 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.595	1.413		1.836	.073
FDR	.015	.002	.099	2.720	.002
CAR	.031	.004	.422	3.052	.004
SBIS	3.223E-5	.000	.032	.240	.811

a. Dependent Variable: NPF

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dan ditentukan dengan nilai-nilai yang tercantum pada kolom B yaitu :

$$Y = 2,595 + (0,015)X_1 + (0,031)X_2 + (3,223 \times 10^{-5})X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut maka disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) adalah 2,595 artinya bahwa jika FDR, CAR, dan SBIS tidak berubah atau pada kondisi konstanta bernilai 0, maka rata-rata NPF pada BUS yang terdaftar di OJK akan bernilai 2,595.
- Nilai koefisien regresi variabel FDR (b_1) bernilai positif sebesar 0,015 artinya bahwa FDR berbanding lurus dengan NPF pada BUS yang terdaftar di OJK. Apabila FDR mengalami peningkatan satu kali sedangkan variabel lainnya tidak mengalami perubahan yang konstan, maka NPF akan naik sebesar 0,015. Artinya BUS yang nilai FDR yang tinggi maka akan mengalami peningkatan dalam hal NPF nya.
- Nilai koefisien regresi variabel CAR (b_2) bernilai positif sebesar 0,031 artinya bahwa CAR berbanding lurus dengan NPF pada BUS yang terdaftar di OJK. Apabila CAR mengalami peningkatan satu kali sedangkan variabel lainnya tidak mengalami perubahan yang

konstan, maka NPF akan naik sebesar 0,031. Artinya BUS yang nilai CAR yang tinggi maka akan mengalami peningkatan dalam hal NPF nya.

- Nilai koefisien regresi variabel SBIS (b_3) bernilai positif sebesar $3,223 \times 10^{-5}$ artinya bahwa SBIS berbanding lurus dengan NPF pada BUS yang terdaftar di OJK. Apabila SBIS mengalami peningkatan satu kali sedangkan variabel lainnya tidak mengalami perubahan yang konstan, maka NPF akan naik sebesar $3,223 \times 10^{-5}$. Artinya BUS yang nilai SBIS yang tinggi maka akan mengalami peningkatan dalam hal NPF nya.

4.2.4 Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R^2 semakin besar (mendekati 1), maka terdapat pengaruh yang besar pada variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Tetapi jika R^2 semakin mengecil (mendekati nol), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah kecil.

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.460 ^a	.711	.503	1.38525	1.858

a. Predictors: (Constant), SBIS, FDR, CAR

b. Dependent Variable: NPF

Sumber : Lampiran SPSS (data diolah)

Berdasarkan hasil output pada tabel 4.13 diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,503. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel FDR, CAR, dan SBIS terhadap NPF sebesar 50,3%, sedangkan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti variabel profitabilitas, likuiditas, dan variabel lain sebagainya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel FDR, CAR, dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada BUS yang terdaftar di OJK. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang dibuat peneliti dimana hasil yang diperoleh bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} ($4,105 > 2,81$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$).
2. Variabel FDR berpengaruh secara parsial terhadap NPF. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang dibuat peneliti dimana hasil yang diperoleh bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,720 > 1,6787$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).
3. Variabel CAR berpengaruh secara parsial terhadap NPF. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang dibuat peneliti dimana hasil yang diperoleh bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,052 > 1,6787$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$).
4. Variabel SBIS tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPF. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis yang dibuat peneliti dimana hasil yang diperoleh bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,240 < 1,6787$) dengan signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,811 > 0,05$).
5. Koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,503 atau 50,3%. Artinya kontribusi variabel FDR, CAR, dan SBIS mempengaruhi variabel NPF (Y) hanya sebesar 50,3% dan sisanya 49,7% dipengaruhi oleh variabel ₅₂ yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti profitabilitas, likuiditas, dan variabel lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas mengingat variabel independen hanya terfokus pada jenis rasio FDR dan CAR.
2. Pada penelitian ini membahas pengaruh terhadap NPF dengan menggunakan FDR, CAR, dan SBIS sedangkan pada manajemen keuangan banyak faktor yang mempengaruhi NPF yang dimana untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengambil faktor yang lebih luas lagi agar mendapatkan hasil yang signifikan.
3. Bank yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada bank umum Syariah saja sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel penelitian yang berbeda dalam waktu pengamatan yang lebih lama sehingga diharapkan hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan.

Mengklasifikasikan BUS berdasarkan publikasi laporan keuangan, karena ada kemungkinan BUS yang sudah lama stabil dengan yang baru didirikan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya NPF.